



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./ Fax. (021) 3842526 www.kominfo.go.id

Jakarta, 20 Februari 2017

Nomor : 29 /Kominfo/BLSDM/LT.03.07/02/2017
Lampiran :
Perihal : Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Informatika
Kementerian Kominfo Tahun 2017

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di -

Tempat

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, Kementerian Kominfo pada Tahun Anggaran 2017 kembali akan melaksanakan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Informatika yang telah dikembangkan sejak tahun 2007.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah (kecuali PNS Guru dan Dosen), anggota TNI/ Polri;
- Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;
- Berstatus PNS dan TNI/Polri aktif dan telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- Mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) di instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
- Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
- Persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing Perguruan Tinggi yang dipilih.

Program studi yang dibiayai melalui Program Beasiswa ini adalah:

- Program Studi S2 Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintahan (MTI e-Government)

Program Beasiswa untuk bidang studi ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan SDM aparatur pemerintah yang unggul dalam pengembangan e-Government di lingkungan instansi pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Sasaran program adalah tersedianya SDM pengelola e-Government di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

